



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Vol 4
Juli 2026

Trade Lens

An Analytical Perspective on
Trade and Policy

Mengenai DEFA: Kerangka Kerja Sama Ekonomi Digital ASEAN



Seri Publikasi Analisis
Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional



MENGENAL DEFA: KERANGKA KERJA SAMA EKONOMI DIGITAL ASEAN

Menuju Ekosistem Digital ASEAN yang Terhubung, Aman, Kompetitif, dan Inklusif



SEKILAS DEFA

	Studi disahkan	Agt 2023
	Negosiasi dimulai	Sep 2023
	Substansi rampung	Mei 2026
	Target tanda tangan	Nov 2026
	Jumlah anggota	11 negara ASEAN
	Target nilai 2030	USD 2 triliun
	Kontribusi ke PDB ASEAN	USD 366 miliar



Apa itu DEFA?

Digital Economy Framework Agreement (DEFA) merupakan inisiatif strategis ASEAN untuk memperkuat integrasi ekonomi digital kawasan. DEFA dipahami sebagai kerangka kerja sama yang bertujuan menciptakan ekosistem digital ASEAN yang lebih terhubung, aman, interoperabel, kompetitif, dan inklusif. Cakupannya tidak hanya perdagangan elektronik (e-commerce), tetapi juga perdagangan digital, arus data lintas batas, pembayaran digital, identitas digital, keamanan siber, perlindungan data, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan. DEFA digadang menjadi perjanjian ekonomi digital kawasan pertama di dunia yang bersifat menyeluruh (region-wide) dan mengikat secara hukum.



Siapa Saja Anggotanya?

- Brunei Darussalam
- Kamboja
- Indonesia
- Laos
- Malaysia
- Myanmar
- Filipina
- Singapura
- Thailand
- Viet Nam



Catatan: Karena proses DEFA dimulai saat ASEAN masih beranggotakan 10 negara, status dan mekanisme keterlibatan Timor-Leste akan merujuk pada ketentuan akhir perjanjian dan proses penyesuaian yang disepakati ASEAN.

DEFA DAN KETERKAITANNYA DENGAN AEC/MEA



DEFA berkaitan erat dengan ASEAN Economic Community (AEC) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), namun keduanya berbeda cakupan. AEC adalah salah satu dari tiga pilar Komunitas ASEAN sejak 2015 – kerangka payung integrasi ekonomi kawasan secara luas, mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi, aliran modal, hingga tenaga kerja terampil. DEFA berada di bawah arsitektur AEC tersebut, namun hadir sebagai perjanjian tersendiri yang secara khusus dan komprehensif mengatur ekonomi digital.



Jika ketentuan e-commerce selama ini hanya menjadi satu bab dalam perjanjian dagang yang lebih luas, DEFA dirancang sebagai perjanjian mandiri yang berfokus penuh pada tata kelola ekonomi digital lintas negara – mulai dari perlakuan non-diskriminatif produk digital, transfer data lintas batas, kode sumber, hingga lokasi fasilitas komputasi. Dengan kata lain, AEC adalah kerangka besar integrasi ekonomi ASEAN secara umum, sementara DEFA adalah instrumen turunan yang lebih spesifik dan teknis untuk ekonomi digital, sekaligus mendukung pencapaian ASEAN Economic Community Blueprint 2025 dan ASEAN Community Vision 2045.





9 Pilar DEFA:

Peluang & Tantangan Indonesia



ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA)

Pilar DEFA	Peluang untuk Indonesia	Tantangan untuk Indonesia
1. Digital Trade	Memperluas ekspor jasa digital Indonesia ke pasar ASEAN yang lebih terintegrasi.	Menyesuaikan regulasi nasional agar selaras dengan komitmen perdagangan digital ASEAN.
2. Cross-border E-commerce	UMKM digital Indonesia lebih mudah menjangkau konsumen ASEAN melalui aturan yang lebih harmonis.	Meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM agar mampu bersaing di pasar regional.
3. Digital Payments & E-invoicing	Interoperabilitas pembayaran dan e-invoice memudahkan transaksi lintas negara dan menurunkan biaya bisnis.	Mengintegrasikan sistem pembayaran nasional dan e-invoicing dengan standar ASEAN.
4. Digital Identity & Authentication	Pengakuan identitas digital lintas negara membuka akses layanan digital regional bagi masyarakat dan bisnis.	Membangun infrastruktur identitas digital yang aman, andal, dan dapat diakui secara regional.
5. Cross-border Data Flows & Data Protection	Arus data lintas negara yang lancar mendorong inovasi, cloud services, dan ekonomi berbasis data.	Menyeimbangkan keterbukaan arus data dengan perlindungan data pribadi dan keamanan nasional.
6. Cybersecurity & Online Safety	Meningkatkan kepercayaan pengguna dan pelaku bisnis digital di seluruh ASEAN.	Memperkuat kapasitas keamanan siber nasional dan kerja sama operasional lintas negara.
7. Emerging Technologies (AI, dll.)	Mempercepat adopsi AI dan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi.	Menyiapkan regulasi dan etika pemanfaatan AI serta talenta yang relevan.
8. Digital Talent Mobility	Memudahkan pergerakan talenta digital, membuka peluang kerja dan kolaborasi regional.	Meningkatkan kompetensi dan sertifikasi talenta digital agar memenuhi standar regional.
9. Competition Policy	Persaingan yang sehat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif.	Memperkuat kelembagaan dan penegakan hukum persaingan di era ekonomi digital.

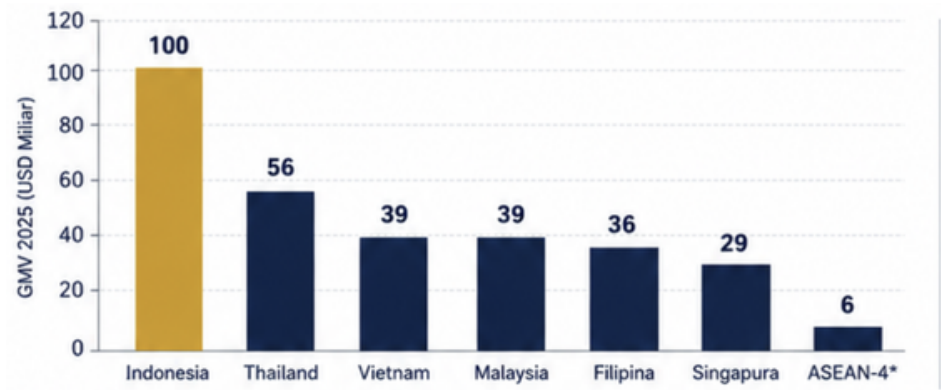
NILAI EKONOMI DIGITAL ASEAN: SEBERAPA BESAR PORSI INDONESIA?

Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2025 yang dirilis Google, Temasek, dan Bain & Company (November 2025), ekonomi digital ASEAN — diukur dari Gross Merchandise Value (GMV) — diperkirakan melampaui USD 300 miliar pada 2025, tumbuh 15% dibandingkan tahun sebelumnya dan 1,5 kali lipat dari proyeksi awal satu dekade lalu. **Indonesia mencatatkan nilai tertinggi**, dengan GMV **hampir mencapai USD 100 miliar (tumbuh 14% YoY)**, mempertahankan posisinya sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.



Tabel 1: Nilai Ekonomi Digital (GMV) ASEAN per Negara, 2025

Negara	GMV 2025 (USD Miliar)	Pertumbuhan (YoY)	Keterangan
Indonesia	~100	+14%	Ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara
Thailand	~56	+16%	Terbesar kedua di kawasan
Vietnam	~39	naik dari USD 34 M (2024)	Pertumbuhan merata di semua sektor
Malaysia	~39	+19%	Pertumbuhan tercepat di ASEAN 2025
Filipina	~36	+16%	Terdepan dalam adopsi AI di kawasan
Singapura	~29	+7%	Hub AI dan jasa keuangan digital
Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar	~6	—	Baru masuk cakupan laporan sejak 2025
Total ASEAN-10	>300	+15%	1,5x proyeksi awal 10 tahun lalu



Gambar 1. Nilai ekonomi digital (GMV) ASEAN, per negara (USD Miliar)
Sumber: e-Economy SEA 2025

Angka GMV per-negara di atas adalah nilai ekonomi digital domestik masing-masing untuk kategori berikut:

- E-commerce
- Transportasi & Pengantaran
- Pengantaran Makanan
- Media Daring
- Perjalanan Daring

Dampak dan Kontribusi DEFA bagi Indonesia

Bagi Indonesia, DEFA memiliki nilai strategis karena posisinya sebagai kekuatan utama ekonomi digital ASEAN. Secara kawasan, penerapan aturan DEFA yang progresif diperoyalakan dapat menggandakan nilai ekonomi digital ASEAN dari sekitar USD 1 triliun (proyeksi organik 2030) menjadi sekitar USD 2 triliun pada 2030.

Dari target nilai ekonomi digital ASEAN sebesar 2 triliun tersebut, Pemerintah melalui Menko Perekonomian memperkirakan sekitar USD 600 miliar merupakan porsi bagi Indonesia, mencerminkan posisi Indonesia sebagai pasar digital terbesar di kawasan selengkapnya penerima manfaat utama dari integrasi ekonomi digital ASEAN.



Kontribusi Indonesia dari Target ASEAN 2030

USD 600 miliar

— perkiraan porsi Indonesia dari target nilai ekonomi digital ASEAN sebesar USD 2 triliun pada 2030, seperti disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Angka ini menegaskan besarnya kepentingan Indonesia untuk memastikan DEFA diimplementasikan secara efektif dan tepat waktu.



Saluran Kontribusi ke Ekonomi Nasional

1



Peningkatan perdagangan digital dan e-commerce Lintas Negara

DEFA memperlancar arus data, pengakuan dokumen elektronik, identitas digital, dan pembayaran lintas batas, membuka peluang memperluas pasar negara ASEAN lain.

2



Penguatan ekspor jasa digital

Meningkatkan ekspor jasa digital termasuk fintech, online travel, dan layanan berbasis platform, memperkuat posisi Indonesia sebagai penyedia solusi digital bagi kawasan

3



Peningkatan Investasi

Mendorong investasi pada pusat data (data center), cloud, AI, cybersecurity, dan digital payment; meningkatkan kualitas infrastruktur digital Indonesia sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang.

4



Peningkatan produktivitas sektor Rill

Digitalisasi proses bisnis di logistik, manfaat pertanian, dan tata letak kolada platform perlu diperkuat agar produk-produksi digital berjalan berkelanjutan dan berkeadilan.



Risiko yang Perlu Diantisipasi



Persaingan yang makin ketat
Dampak meninggalkan digital meningkatkan intensitas persaingan, terutama bagi UMKM dan startup nasional.



Perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan keamanan digital menjadi isu strategis yang krusial.



Keamanan siber dan penipuan digital termasuk penjualan digital, dan kejahatan daring dapat menghambat kooperacyan pengguna dan pelaku usaha.



Tata kolola platform dan perlindungan konsumen
Pembangunan dan tata kolola platform perlu diperkuat agar produk-produksi digital berjalan berkelanjutan dan berkeadilan.

Manfaat DEFA bagi Indonesia



Perdagangan digital antarmereja ASEAN mengikut



UMKM makin terhubung dan akses pasar kawasan terbuka



Investasi di sektor digital dan teknologi menguat



Daya saing ekonomi nasional meningkat secara berkelanjutan



Produktivitas sektor Rill meningkat dan manfaat dirasakan lebih luar



Apa yang Perlu Dipersiapkan Indonesia



Manfaat DEFA bagi Indonesia tidak bersifat otomatis. Diperlukan langkah-langkah menyeluruh agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar besar, tetapi juga pelaku utama dan pusat nilai tambah ekonomi digital kawasan.

1

Pemerataan Infrastruktur Digital

Memperkuat pemerataan infrastruktur digital — jaringan, data center, konektivitas agar manfaat DEFA dapat diaplikasikan di industri pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjangkau daerah, sejalan dengan Strateti Nasional Ekonomi Digital Indonesia 2030.

Jaringan

Data Center

Konektivitas

2

Penguatan SDM Digital

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia digital, termasuk talenta di bidang keamanan siber, data analytics, kecerdasan buatan, cloud computing, digital marketing, dan manajemen platform, untuk menyerap manfaat integrasi digital ekonomi ASEAN.

Talenta Digital

Keamanan Siber

AI & Data

3

Kesiapan UMKM Lintas Batas

Memperkuat kesiapan UMKM agar tidak hanya masuk ke ekosistem digital domestik, tetapi juga mampu mengatasi tantangan negara negara digital di ASEAN — dari logistik, pembayaran, literasi digital, hingga kepatuhan standar perlindungan konsumen dan data.

Logistik

Pembayaran

Perlindungan Data

4

Regulasi dan Koordinasi Kelembagaan

Memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi transaksi elektronik, tanda tanggung, atau transaksi digital, dengan transaksi siber, dan persiapan usaha digital, disertai koordinasi lintas kementerian/lembagaing mengatasi DEFA menyentuh sektor perdagangan, komunikasi digital, kerja sama, dan inovasi teknologi, kepadaban, hingga perlindungan konsumen.

Regulasi

Koordinasi

Harmonisasi

DEFA dapat mendukung peningkatan perdagangan digital, memperluas akses pasar UMKM, menarik investasi sektor teknologi, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional — namun manfaat ini bergantung pada kesiapan Indonesia sendiri.

Linimasa proses DEFA

Agt 2023

Studi DEFA diserahkan AEM

Sep 2023

Negosiasi DEFA dimulai

Mei 2026

Substansi rampung di Manila

Nov 2026

Target penandatanganan

2030

Target nilai USD 2 triliun

TARGET PENANDATANGANAN

November 2026, bersamaan dengan KTT ASEAN ke-49 dan AEC Council ke-28. DEFA belum berlaku penuh hingga proses ratifikasi domestik masing-masing negara anggota selesai.

Manfaat DEFA bagi Indonesia

Meningkatkan perdagangan digital antarnegara ASEAN

Memperluas akses pasar UMKM secara regional

Menarik investasi dari sektor digital dan teknologi

Memperkuat daya saing ekonomi nasional

Menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Trade Lens

Seri Publikasi Analisis

Tentang Trade Lens

Trade Lens adalah seri publikasi analisis dari Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional yang menyajikan perspektif, data, dan rekomendasi berbasis riset mengenai perdagangan, kebijakan, dan dinamika ekonomi global. Kami berkomitmen menghadirkan analisis yang objektif, relevan, dan berdampak bagi pengambilan keputusan strategis.



Pusat Kebijakan
Perdagangan Internasional

Trade Lens

Perspektif Analisis atas Perdagangan dan Kebijakan